

# **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

**Oleh : Dimas Zulfitriah**

**Pembimbing : Adlin, S. Sos, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL.H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Throughout 2020, Indonesia faced the Covid-19 pandemic which made all life orders undergo very significant changes, including the political field. The government remains adamant about holding regional elections on December 9 when the Corona outbreak has not subsided. This has reaped pros and cons among political elites and observers. Political participation is the activity of citizens who act as individuals intended to influence decision-making by the government, since participation can be individual or collective, organized or spontaneous, steady or sporadic, peacefully or violently, legally or illegally, effectively or ineffectively. This research uses a qualitative research type method, namely a research procedure that produces descriptive data. As for the descriptive data in question, it is speech or writing and the observable behavior of the person (the subject himself). In qualitative research, no numbers were found that were analyzed using statistical tools, but rather data were obtained from descriptive research. Descriptive means used to reveal an empirical fact objectively scientifically based on the logic of the author's scientific discipline, namely Government Science. The results showed that in Indragiri Hulu Regency, the participation rate increased with the number of voters 193,299 people with a ratio of 66.73% compared to the previous period of regional elections. The supporting factor for the increase in the level of community participation in the regional elections in Indragiri Hulu Regency during the Covid-19 pandemic refers to the theory of the awareness of the People of Indragiri Hulu in carrying out their obligations as a society, then the diverse political situation can be seen from the large number of election participants who have various professional backgrounds so as to reach various groups. Next is campaign activities as a targeted participation stimulant with various restrictions and rules from election organizers.*

**Keywords :** *Regional Elections, Participation, Covid 19*

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpuk pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam artian yang sesungguhnya”(Rosana, 2016). Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum.

Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Peran masyarakat disini bisa dalam bentuk Partisipasi Politik. partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya (Budriardjo, 2008).

Sejalan dengan itu pada tahun 2020 negara Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi di beberapa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada tersebut akan dilaksanakan di rentang bulan

juni hingga september. Namun agenda pilkada tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pada tahun 2020 ini terjadi wabah pandemi covid 19.

Covid 19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publi, tetapi juga sektor lain termasuk ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik Menurut Kennedy & suhendarto (2020), pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk menunda Pilkada 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020.

Pasal 120 Perpu Pilkada mengatur bahwa:

1. *Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.*
2. *Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti.*

Ada 3 perubahan mendasar yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020, *Pertama*, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan

rangkaian pilkada. *Kedua*, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. *Ketiga*, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana non-alam pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh kawasan terutama di daerah penyelenggara pilkada.

KPU menargetkan partisipasi pemilih Pilkada tahun ini lebih tinggi dari gelaran serupa sebelumnya. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 64%. Lalu, pada Pilkada 2017 mencapai 71,58%. Pada Pilkada 2018 mencapai 73,24%. Namun, target tersebut lebih rendah dari capaian pada Pemilu 2019 yang sebesar 82%. Akan tetapi, kasus Covid-19 yang terus meningkat hingga saat ini berpotensi membuat target KPU tak tercapai.

Dikutip dari jurnal *liipi politik*, Selain persoalan ketidakpastian data, tidak akuratnya data pemilih juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada pilkada. Sebagai ilustrasi, kajian Moch. Nurhasim (dkk) pada 2015 dan 2016 mengenai tingkat kehadiran pemilih pada pilkada (*voter turn out*) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada di Medan dan Batam karena pemilih yang merantau dan tingkat mobilitas pemilih yang tinggi. Akibatnya, selain tidak bisa dilakukan pemutakhiran sehingga data kurang *update* dan tidak sesuai dengan pemilih yang aktual, seringkali penyelenggara juga kesulitan untuk mencari alamat pemilihnya.

Dikutip dari *katadata.co.id*, di negara Prancis tingkat partisipasi hanya 44,7 %, Iran 43,32 % kemudian Mali hanya 7,5 %.

Masyarakat juga dinilai tidak akan bersemangat untuk datang ke TPS karena rentan terjadinya penularan Covid 19. Beberapa lembaga survei pun telah memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 akan berada di bawah target KPU. Indikator Politik Indonesia, misalnya, mencatat jumlah pemilih di Indonesia yang kemungkinan besar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebanyak 40,7%. Sementara, 47,1% responden menyatakan kemungkinan mereka datang ke TPS kecil. Khusus di wilayah penyelenggara Pilkada, hanya 43,9% responden yang kemungkinan besar datang ke TPS meski ada pandemi corona. Sedangkan, 42,7% lain kemungkinan kecil datang ke TPS. Sementara itu, hasil survei SMRC per 18-21 November 2020 mencatat 91% warga Indonesia mengetahui di daerahnya akan ada Pilkada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92% responden menyatakan akandatang ke TPS. Hanya 18% responden yang tahu ada Pilkada 2020 di daerahnya tak akan datang ke TPS. Jumlah ini menurun jika dibandingkan beberapa survei SMRC di periode sebelumnya.

**Tabel 1.1**

**Sebaran Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hulu**

Kecamatan	Jumlah Kasus	Sembuh	Wafat	Iso Mandiri	Isolasi Rumah Sakit
Batang Gangsal	13	2	0	9	2
Batang Cenaku	18	17	1	0	0
Pasir Penyuh	125	123	1	0	1
Peranap	23	14	1	7	1
Siberida	44	21	2	18	3

Batang Peranap	1	1	0	0	0
Rengat	198	149	5	32	12
Rakit Kulim	14	14	0	0	0
Lubuk Batu Jaya	46	45	0	0	0
Rengat Barat	106	80	1	20	5
Kelayang	10	10	0	0	0
Kualu Cenaku	3	2	0	1	0
Sungai Lala	7	7	0	0	0
Lirik	35	24	1	10	0
<b>Total</b>	<b>643</b>	<b>509</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>24</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Namun tetap berpedoman pada peraturan yang sudah disepakati, pilkada serentak tetap dilaksanakan. Salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu yang diikuti oleh 5 pasang kandidat yang telah lolos verifikasi yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung
1	Dr. Nurhadi, S.POG – Kapten (P) Toni Sutianto	Independen
2.	Rezita Meylani Yopi, S.E – Drs. Junaidi Rachmad, M.Si	Golkar, Nasdem, Hanura
3.	Dra. Siti Aisyah, SH., M.Km – Agus Rianto, SH., MH	Gerindra, PPP, PKPI

4.	Irjenpol (P) Wahyu Adi, SH., MH., Msi- Hj. Supriati	PDI-P, Demokrat, PAN, Perindo
5.	Rizal Zamzami- Yoghi Susilo	PKS, PKB

Sumber : KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Pada pilkada yang diadakan tersebut tingkat partisipasi masyarakat Indragiri Hulu belum mencapai target nasional yaitu sebesar 77,5 %. Namun tingkat partisipasi naik dari pada pilkada sebelumnya. Dimana pada pilkada tahun 2015 partisipasi pemilih adalah 57,83 % dan pada pilkada tahun ini mencapai 66,7 %.

**Tabel 1.3**

**Hasil Pleno KPU Indragiri Hulu**

Kecamatan	Jumlah Suara	
	1	2
Batang Cenaku	4.129	12.427
Batang Gangsal	2.627	6.737
Batang Peranap	1.627	3.491
Kelayang	5.123	5.275
Kuala Cenaku	2.607	3.823
Lirik	4.361	5.546
Lubuk Batu Jaya	3.060	6.079
Pasir Penyau	7.022	6.489
Peranap	8.018	4.886
Rakit Kulim	2.680	6.022
Rengat	11.87	11.242
Rengat Barat	8.901	10.538
Seberida	7.190	12.275
<b>Jumlah</b>	<b>71.225</b>	<b>99.191</b>

Sumber : KPU Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara, dari 298.281 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 174.251 jiwa atau 58,42 % yang menggunakan hak pilih. Sementara, 124.030 jiwa atau 41,58 % warga Inhu tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Tingkat partisipasi yang sangat jauh dari target nasional yakni 77,5 %

Berbanding terbalik dengan kondisi pada pilkada 2020 ini. Sejumlah pengamat politik menilai penyelenggaraan pilkada 2020 terkesan memaksa. Dimana pemerintah sebelumnya bersikeras untuk mencegah terjadinya kerumunan yang dianggap sebagai penyebar covid. Sekolah diliburkan, akses jalan ditutup, dan juga pada Peringatan Hari Raya Idul fitri saja masyarakat dilarang untuk mudik. Semntara pilkada tetap dilaksanakan. Dan alangkah terkejutnya dikarenakan ini pula tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

**Tabel 1.5**  
**Hasil Pleno KPU**

Kecamatan	Jumlah Suara				
	1	2	3	4	5
Batang Cenaku	2.333	5.504	5.328	3.465	2.401
Batang Gangsal	881	2.563	3.308	3.896	943
Batang Peranap	430	964	1.389	1.272	2.036
Kelayang	563	3.578	1.545	2.229	4.503
Kuala Cenaku	592	1.839	1.454	2.027	1.180
Lirik	1.550	3.365	1.745	1.373	2.963
Lubuk Batu Jaya	1.043	3.300	1.657	1.807	2.527
Pasir Penyau	1.394	4.159	1.937	2.367	4.827
Peranap	506	2.110	2.713	1.874	7.900
Rakit Kulim	569	4.639	1.611	1.613	2.068
Rengat Barat	2.950	5.886	3.784	3.835	5.600
Rengat	2.938	5.397	3.250	4.688	7.784
Seberida	2.870	5.012	5.204	4.354	3.784
Sungai Lala	664	2.750	855	1.581	1.586
<b>Jumlah</b>	<b>19.283</b>	<b>51.066</b>	<b>35.780</b>	<b>36.381</b>	<b>50.102</b>

Sumber : KPU Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil pleno tersebut jumlah DPT di Kabupaten Indragiri Hulu adalah 291.485 Jiwa dengan 1.021 TPS dan jumlah pemilih adalah 193.299 Jiwa. Dengan rasio 66,73 Persen dimana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari perbandingan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemi covid 19 tidak menjadi penyebab turunnya partisipasi masyarakat. Penulis beranggapan bahwa tingkat kenaikan partisipasi masyarakat didukung oleh hegemoni dan tata cara kampanye yang sangat maksimal dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati. Mengingat ada 5 pasang calon bupati. Terbanyak di provinsi Riau.

Dengan keunikan pilkada serentak tahun 2020 ini lah penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu)**”

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Kabupaten Indragiri Hulu?”

#### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Kabupaten Indragiri Hulu dimasa pandemi covid 19

#### Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu
  - (Ni ketut Arniti, 2014) dengan judul penelitian Partisipasi Politik

- Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar
- (Muhammad Bayu Dwi Cahyo, 2014) Dengan judul penelitian tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara pada pemilu legislatif 2014
  - (Hassanudin, 2020) dengan judul penelitian menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)
  - (Primandha Sukma Nurwardhani, 2019) dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum
  - (Ahclak Asmara Yasa, 2019) dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap pemilih Pemula di Kelurahan Batang Baluku
  - (Rio Sholihin, 2019) dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
  - (M. Wijaya, 2019) Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi.
  - (T. Heru, 2020) dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan.

## Kerangka Teori

### Pilkda Serentak di Masa Pandemi

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang

keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Seperti banyak diketahui, Perpu Pilkada merupakan dasar hukum penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (“Pilkada”) serentak dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Namun lebih dari itu, Perpu Pilkada ini juga menyesuaikan aturan main mengenai pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilkada pada saat wabah berlangsung.

Pasal 120 Perpu Pilkada tersebut hanya menambahkan satu frasa dari Pasal 120 yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu ‘bencana nonalam’. Namun penambahan ini esensial karena pandemi COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai bencana nonalam, berdasarkan **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional***. Berdasarkan ketentuan itulah, diatur bahwa pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020, ditunda karena terjadi bencana non-alam.

### Partisipasi Politik

Menurut Damsar (2012:179) partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, makapartisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Pengertian penggabungan makna tersebut telah memberikan suatu pemahaman tentang sekitar apa saja cakupan konsep sosiologi politik.

Dengan berpedoman pada pendapat Daves dalam Ndraha (2002) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu :

1. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberi kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, jasa, uang dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban. Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok (Arniti, 2020).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskriptif. Deskriptif artinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni Ilmu Pemerintahan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Indragiri Hulu**

Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dilaksanakan pada Hari Rabu 9 Desember 2020 saat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun karena Pilkada serentak ini sebelumnya juga sempat tertunda, maka tidak ada pilihan lain selain harus menggelar Pilkada di tengah pandemi. Pilkada kali ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya karena digelar dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi kerumunan warga agar tidak menjadi kluster baru penyebaran virus. Meskipun pandemi covid-19 sedang berlangsung, hal ini tidak menyurutkan partisipasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyalurkan suaranya. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 Kecamatan dan mayoritas memenangkan pasangan Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk mengetahui partisipasi politik maka dapat dianalisa dengan melihat data statistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang tingkat partisipasi pemilih di

Kabupaten Indragiri Hulu pada Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015. Berikut data Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu :

**Gambar 3.1.1**

**Persentase Suara Sah pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu**



**Gambar 3.1.2**

**Penggunaan Hak Pilih Masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu**



Sumber : KPU Indragiri Hulu 2015

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara, dari 298.281 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 174.251 jiwa atau 58,42 % yang menggunakan hak pilih. Sementara, 124.030 jiwa atau 41,58 % warga Inhu tidak

menggunakan hak pilihnya alias golput. Tingkat partisipasi yang sangat jauh dari target nasional yakni 77,5 %. Jumlah DPT di Kabupaten Indragiri Hulu adalah 291.485 Jiwa dengan 1.021 TPS dan jumlah pemilih adalah 193.299 Jiwa. Dengan rasio 66,73 % dimana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Namun, dalam Pilkada Inhu 2020 ini tidak hanya dari pemilih yang terdaftar dalam DPT saja melainkan terdapat tambahan pemilih dari yang pindah memilih (DPPH) sejumlah 702 orang dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sejumlah 3.219 sehingga jumlah pemilih bertambah menjadi 295.406 orang. Sementara itu yang menggunakan hak pilih dari 295.406 orang tersebut adalah berjumlah 193.361 orang, sehingga diperoleh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 adalah 65,45%. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 ini meningkat dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya berada pada angka 57,83%. Dengan demikian terdapat peningkatan 7,62% partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu tahun 2020. Peningkatan partisipasi politik masyarakat ini tentu saja merupakan hasil yang baik di tengah kekhawatiran merebaknya pandemi COVID-19 yang menimbulkan prediksi bahwa angka partisipasi politik masyarakat akan rendah. Namun, berkat sosialisasi dari penyelenggara Pilkada, tim kampanye masing-masing paslon, dan pemerintah daerah baik dengan memasang alat peraga, iklan di media massa, media elektronik, dan sosial media (sosmed) turut berkontribusi dalam meningkatkan animo masyarakat ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Inhu 2020.

Kondisi Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan masyarakat untuk

menggunakan hak pilihnya dengan tetap datang ke TPS serta menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam PKPU pasal 74 dinyatakan:

(1) Pemberian suara pada Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan

b. Anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.

(2) Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.

(3) Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

(4) Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

Pada pilkada sebelumnya kegiatan bersama erat kaitannya dengan kegiatan kampanye atau dialog para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke masyarakat. Namun di masa pandemi kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan seperti pada biasanya. Pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 BAB VI tentang Kampanye Pasal 57 disebutkan:

*“Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan Alat Peraga Kampanye; f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Sesuai dengan amanat PKPU tersebut para pasangan calon dan tim pemenang harus memutar otak dan strategi. Salah satunya adalah pasangan calon No urut 02 yakni Rezita Meylani Yopi dan Djunaidi Rachmat. Dikutip dari portai media online mereka melakukan kampanye dialogis di 300 titik di seluruh wilayah kabupaten Indragiri Hulu selama lebih kurang 70 hari masa kampanye dengan melakukan minimal 10 titik dalam sehari dengan melakukan pembatasan sesuai dengan aturan KPU yakni 50 orang dan mematuhi protokol Kesehatan, namun masyarakat yang hadir melebihi ketentuan yang dilakukan.

Sementara itu pasangan calon No urut 4 yakni Wahyu Adi dan Supriati melakukan kunjungan ke masyarakat dengan sasaran para Ibu-Ibu kalangan perempuan. Kegiatan kampanye tersebut jua ikut dikawal oleh

pihak kepolisian sekor, Panwascam dan PPK. Salah satu kelebihan kampanye dialogis adalah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keinginan dan harapan secara langsung pada paslon.

Gambar 3.4

Calon Bupati No 02, Rezita Meylani Yopie saat melakukan dialog dengan warga



Sumber : berazam.com

Gambar 3.5

Calon Wakil Bupati No urut 4 Supriati melakukan dialog dengan Ibu-Ibu



Sumber : riaulink.com

Partisipasi dalam bentuk iuran, uang sarana dan prasarana. Selain dari tim kampanye, masyarakat juga terlibat dalam

pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) seperti spanduk dan banner bertuliskan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. APK ini juga menjangkau di daerah pedesaan, beberapa warung kopi, disudut-sudut jalan dan persimpangan. Selain spanduk dan banner di titik-titik dan lokasi tertentu terdapat tempat cuci tangan dengan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana masyarakat yang terlibat sebagai tim sukses yang melakukan. Seperti pada relawan tim pasangan No urut 05 Rizal Zamzami dan Yogi Susilo yang memasang stiker dikaca belakang mobil-mobil rental dan travel.

Gambar 3.6

Alat Peraga Kampanye Pasangan No urut 04



Sumber: Riaudetil.com

Partisipasi uang/ dana, Penggunaan dana kampanye sudah diatur agar transparan. Dan semua Paslon harus melaporkan dana yang masuk dan dikeluarkan selama kampanye. Tidak boleh main-main atau memanipulasi dan semuanya diawasi oleh Bawaslu, termasuk sumbangan dana kampanye dari pihak manapun harus dilaporkan secara patuh. Hal ini termasuk membuat pembukuan yang memuat informasi rekening khusus

dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik dan gabungannya.

Tabel 3.2

Laporan Awal Dana Kampanye Kabupaten Indragiri Hulu

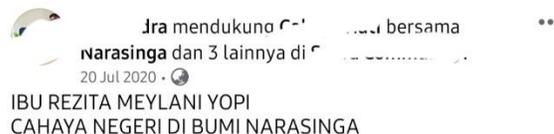
No urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Dana Awal Kampanye
1	Nurhadi-Toni Sutianto	Rp. 1.000.000
2	Rezita Meylani Yopie-Junaidi Rachmat	Rp. 5.000.000
3	Siti Aisyah-Agus Rianto	Rp. 100.00
4	Wahyu Adi- Supriati	Rp. 1.000.000
5	Rizal Zamzami- Yoghi Susilo	Rp. 1.000.000

Sumber : *Riaukarya.com (data diolah)*

Partisipasi dalam bentuk tenaga dan pikiran, masyarakat Indragiri Hulu mengerti akan adanya Batasan-batasan yang ditetapkan KPU melalui peraturan kampanye dan tata cara kampanye. Untuk mensiasatinya para relawan dan partisipan melakukan kampanye melalui media sosial yang menjangkau berbagai kalangan, seperti grup whatsapp dan facebook.

Gambar 3.7

Salah satu masyarakat yang berpartisipasi melalui tulisan di halaman facebook



sudah saatnya rakyat bicara tentang kebahagiaan dan besarnya rasa syukur kerinduan yang membuncah di dalam hati saatnya wanita menjadi bupati sosok pemimpin rakyat yang merakyat IBU REZITA MEYLANI YOPI namanya ini suara rakyat, suara rakyat suara keramat ini suara rakyat, suara rakyat suara narasinga ini bumi indragiri, ini negeri narasinga rakyat isyaratkan di dalamnya bait - bait syair senandung kalimat syukur do'a rakyat senantiasa menembus langit wanita indonesia wanita pilihan rakyat pemimpin rakyat memimpin Indragiri hulu pemimpin rakyat memimpin sepenuh hati meRajut masa datang indragiri masa depan memberikan seberkas sinar harapan CAHAYA NEGERI DI BUMI NARASINGA inhu cemerlang riau gemilang  
InsyaAllah 🙏  
rakyat di belakangmu  
rakyat bersamamu  
rakyat mendukungmu  
rajyat memilihmu  
rakyat mendo'akanmu  
pemimpin inhu 2021-2026  
wanita Indonesia pilihan rakyat  
cahaya negeri di bumi narasinga  
bagi rakyat intan itu sudah bersinar  
intan dikarang, intan permata, intan mustika  
Intan terpilih rakyat, intan pilihan rakyat  
Intan milik rakyat pemilik rakyat  
asal dari rakyat kembali memimpin rakyat  
pemilik amanah rakyat  
pemegang amanat rakyat

Sumber : *Halaman Facebook Rezita Meylani Yopie*

Ada beberapa upaya KPUD Indragiri Hulu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di masa Pandemi Dari temuan hasil wawancara dengan ketua KPUD Indragiri hulu yakni, Ibu Yenni Marida ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masa Pandemi Covid 19:

- 1) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah
- 2) Memperketat Protokol Kesehatan
- 3) Diuntungkan oleh 5 pasangan calon

Untuk mengetahui bagaimana dan latar belakang pemilih datang ke TPS dan berpartisipasi pada pilkada dimasa pandemi covid 19, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Air Molek 1 yakni Bapak Jimi Susandi yang juga menjabat sebagai RW 002

*“Kesadaran politik yang melatar belakangi saya ikut berpartisipasi pada pemilu ini. Sebagai warga negara, saya wajib berkontribusi dalam memberikan suara saya, walaupun pada akhirnya apa yang saya pilih tidak menang, setidaknya saya sudah ikut andil dalam kontestasi pemilu ini”*

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, informan tersebut mengerti akan kesadaran politik sebagai warga negara. Tidak peduli dengan hasil yang ia dapat setidaknya partisipasi yang ia lakukan mencerminkan bahwa apapun kondisinya tidak menjadi penghalang untuk dirinya berpartisipasi. Surbakti menjelaskan yang dimaksud kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik

seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007) menyebutkan ada variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara.

Pilkada serentak yang juga dilaksanakan dimasa pandemi covid 19 ini juga memiliki keunikan tersendiri, menurut pakar dan pengamat politik masyarakat tidak akan mau datang ke TPS dikarenakan adanya kerumunan yang ditakutkan muncul *cluster* baru. Akibatnya tingkat partisipasi cenderung akan berkurang, namun tidak demikian. Menurut pendapat Ali Sadikin yang juga sebagai anggota KPPS :

*“Tidak masalah dengan adanya pandemi ini, masyarakat kita udah pintar dan melek informasi. Baik dari televisi maupun dari media media online. Mereka yakin walaupun dimasa pandemi pasti ada solusi-solusi dan mereka taat untuk melakukan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) malah kemarin ada yang ikut ngebantu kpps untuk mengganti air untuk cuci tangan”*

Dari hasil wawancara tersebut, semua informan yang diwawancari tidak terpengaruh dengan penyebaran virus covid 19 ini.

Pelaksanaan pemilu dengan protokol kesehatan menjadi alasannya.

Faktor pendukung naiknya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu :

- 1) Kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu yang tinggi.
- 2) Faktor pendidikan masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap tindakan atau kegiatan masyarakat untuk terlibat menjadi anggota partai politik.
- 3) Faktor status sosial yang menitikberatkan pada pekerjaan memperlihatkan pengaruhnya pada keterlibatan dalam partai politik dan kegiatan kampanye, artinya keadaan dan kondisi pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda dapat membedakan sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam kedua kegiatan itu.
- 4) Faktor kedekatan emosional menyatakan bahwa kedekatan emosional juga terbukti mempengaruhi masyarakat untuk aktif dalam proses politik seperti terlibat partai politik dan kegiatan kampanye, walaupun tidak terlalu kuat/besar.
- 5) Situasi kondisi yang terjadi pada saat tahapan pemilu adalah pandemi covid 19.
- 6) 5 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pemilu membuat masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Penyau sangat tertarik dalam keikutsertaan dalam partisipasi politik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi politik dalam pilkada serentak di masa pandemi studi kasus Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi politik di Kabupaten Indragiri Hulu di masa pandemi mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran dari penyelenggara dari pilkada ini sendiri. Yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Indragiri Hulu. Strategi yang digunakan antara lain sosialisasi pemilihan melalui webinar dan pemanfaatan media social, penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga dari awal tahapan pemilu hingga selesai tidak ada cluster baru di Kabupaten Indragiri Hulu, seluruh anggota KPPS melakukan swab untuk menekan angka penyebaran covid 19.
2. Faktor-faktor pendorong yang membuat naiknya angka partisipasi adalah kesadaran politik dari masyarakat yang tinggi, adanya persaingan yang ketat dari 5 pasangan calon yang memiliki basis masa tersendiri dan dari berbagai kalangan, termasuk juga pengaruh aktor politik yang mempengaruhi dan mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
3. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan bersama dengan pembatasan-pembatasan seperti durasi waktu, jumlah masyarakat yang hanya 50 orang, pemasangan alat peraga kampanye spanduk, baliho baik di belakang kaca mobil dan persimpangan yang ramai dilewati oleh masyarakat.

Penyebaran stiker dan kaos yang bertuliskan salah satu paslon.

4. Situasi pandemi covid 19 tidak menjadi penghalang bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri hulu untuk menggunakan hak pilihnya, dari beberapa narasumber yakni masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya ingin perubahan yang dating dari pemimpin baru.

### Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2020 Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu ), maka penulis mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, kelurahan, dan Masyarakat umum, yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam melihat bahwa partisipasi rakyat menjadi indikator cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan tak selalu berkorelasi secara linier dengan kualitas pemilihan itu sendiri. Kualitas yang lebih menyandarkan pada upaya untuk memberi pemahaman tentang pemilihan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi serta artikulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.
2. Naiknya tingkat partisipasi diartikan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menang memiliki legitimasi yang kuat dan ini juga menjadi tantangan untuk satu periode kedepan yang mana legitimasi yang diberikan oleh rakyat

haruslah dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Damsar.2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:Kencana.
- Darmawan, Ikhsan.2015 *Mengenal Ilmu Politik*.Jakarta: Kompas.
- Miriam, Budiardjo.2009.*Dasar-dasar Ilmu Politik* .Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Sugiyono. 2017.*Metode Penelitian Kombinasi*.,Bandung : Alfabeta.

#### Jurnal

Adlin. (2011). *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum* (Nomor February 2012).

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>

Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 2(1).

Cain, M., & Cain, M. (2020). *ScholarWorks @ BGSU Trust , Political Participation , and Poverty : The Effects of Poverty on Political Behavior The Effects of Socioeconomic Class on Political Behavior*.

Djuyandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2018). Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 195–207. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.195-207>

Glinka, T. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. February 2013.

Han, E. S., & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee, A. (2019). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI KABUPATEN GOWA (STUDI TERHADAP PEMILIH PEMULA DI KEL.BATANG KALUKU KEC.SOMBA OPU KAB.GOWA) Skripsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.

Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28. [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppme\\_kososbudkum/article/viewFile/17190/16738](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppme_kososbudkum/article/viewFile/17190/16738)

Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. In *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. <http://repository.unp.ac.id/72/>

Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>

Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal TAPIs*, 12(1), 37–53.

Sa, L. M. A., Arya, A., & Wijaya, M. (2018). *Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi Lack of Community Political Participation in the Selection of the Regional Head in the Wakatobi District. I(II)*, 35–43.

Sumpf, D., & Officer, E. A. (2015). *United Nations Sabbatical Leave Programme 2014 - Report Political Participation of the Arab Middle Class – Motivation and Access*.

Situs Berita

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020  
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>

Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>. Penulis : Luthfia Ayu Azanella

Ini 7 tantangan pelaksanaan pilkada saat pandemi  
<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-7-tantangan-pelaksanaan-pilkada-saat-pandemi-1?page=2>

Katadata.co.id dengan judul "Denyut Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 - Analisis Data Katadata",  
<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fd073aced589/denyut-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19> Penulis: Muhammad Ahsan Ridhoi

Ada Dugaan Politik Uang di Indragiri Hulu Rudi Kurniawansyah | Nusantara  
<https://mediaindonesia.com/nusantara/367474/ada-dugaan-politik-uang-di-indragiri-hulu>

Partisipasi pemilih pilkada di Riau naik di tengah pandemi, ini sebabnya  
<https://riau.antaranews.com/berita/195904/partisipasi-pemilih-pilkada-di-riau-naik-di-tengah-pandemi-ini-sebabnya>

Kampanye di 300 titik, masyarakat inhu tunjukan ketulusan pada paslon Rajut, bukan kepura-puraan  
<https://www.berazam.com/read-125625->

[2020-12-04-kampanye-di-300-titik-masyarakat-inhu-tunjukkan-ketulusan-pada-paslon-rajut-bukan-kepurapuraan.html#sthash.abzcldgK.dpbs](https://www.riaukeberita.com/news/detail/16186/kampanye-di-kecamatan-seberida-calon-wakil-bupati-inhu-nomor-urut-4-kunjungi-makmak-desa-sibabat)  
Jumat 04 Desember 2020, 09:19 WIB

Kampanye di Kecamatan Seberida calon Wakil Bupati Inhu nomor urut 4 kunjungi mak-mak Desa Sibabat <https://riaulink.com/news/detail/16186/kampanye-di-kecamatan-seberida-calon-wakil-bupati-inhu-nomor-urut-4-kunjungi-makmak-desa-sibabat> Penulis: Jefri kamis 15 Oktober 2020-21:25 WIB

Pemasangan dan penurunan alat peraga kampanye pemasangan BWS [https%3A%2F%2Fwww.riaudetil.com%2Fnews%2Fdaerah%2Findragiri-hulu%2Fluar-biasa-bws-turunkan-sendiri-alat-peraga-kampanye-2020-10-01&tbnid=AgBtefYqetbihM&vet=10CCIQMyh0ahcKEwiYooWW7\\_jzAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=SK2PYmRDDQivhM&w=700&h=525&itg=1&q=kampanye%20di%20indragiri%20hulu&ved=0CCIQMyh0ahcKEwiYooWW7\\_jzAhUAAAAAHQAAAAAQAg](https://3A%2F%2Fwww.riaudetil.com%2Fnews%2Fdaerah%2Findragiri-hulu%2Fluar-biasa-bws-turunkan-sendiri-alat-peraga-kampanye-2020-10-01&tbnid=AgBtefYqetbihM&vet=10CCIQMyh0ahcKEwiYooWW7_jzAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=SK2PYmRDDQivhM&w=700&h=525&itg=1&q=kampanye%20di%20indragiri%20hulu&ved=0CCIQMyh0ahcKEwiYooWW7_jzAhUAAAAAHQAAAAAQAg)

Dinas Kesehatan. Inhu (2020). Sebaran covid di Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Kesehatan Provinsi Riau.co.id

KPU Kabupaten Indragiri Hulu <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/>

KPU Kabupaten Indragiri Hulu 2015 <https://indragirihulukabppid.kpu.go.id/katalog-informasi>

Info Dana Kampanye di Provinsi Riau <https://riaukarya.com/read/detail/6701/ini-dana-kampanye-awal-paslon-9-pilkada-di-riau-terbanyak-sukiman-rp750-juta> Jumat 23 Oktober 2020